

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PONSEL DENGAN IDENTITAS MOBILE (*IMEI*) ILEGAL (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)

Oleh

YUDA PRASETYO

Peredaran *handphone* ilegal di Indonesia semakin meningkat khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini tidak hanya berdampak pada perlindungan konsumen yang berisiko mengalami kerugian akibat produk tanpa jaminan kualitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penerimaan negara karena hilangnya potensi pajak dari barang-barang yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan *handphone* ilegal juga mencederai persaingan usaha yang sehat dan berpotensi mendukung praktik perdagangan ilegal yang lebih luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dalam menanggulangi peredaran *handphone* ilegal serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses kejahatan peredaran *handphone* ilegal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan peredaran barang ilegal, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta observasi terhadap praktik perdagangan *handphone* di wilayah Sumatera Selatan. Dengan kombinasi kedua metode ini, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam penyelesaian permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Sumatera Selatan melalui Upaya preventif yaitu dengan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan preventif dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Bea dan Cukai serta Kominfo untuk melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur masuk *handphone* ilegal. Selain itu juga Polda Sumsel aktif dalam patroli rutin di wilayah perairan Sumatera Selatan. Sedangkan upaya yang dilakukan Polda Sumatera Selatan dalam

memberantas peredaran *handphone* ilegal meliputi penyelidikan dan penyidikan serta pemusnahan *handphone* ilegal sebagai barang bukti. Selain itu juga Polda Sumsel aktif dalam patroli rutin di wilayah perairan Sumatera Selatan. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum, seperti faktor hukum itu sendiri karena tidak ada undang-undang yang mengatur sanksi bagi pengguna *handphone* ilegal, faktor penegak hukum karena tidak ada tindakan aparat penegak hukum terhadap orang yang menggunakan *handphone* ilegal, sarana atau fasilitas yang kurang memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan budaya konsumtif yang lebih mengutamakan harga murah daripada legalitas.

Saran dari penulis ini adalah penegak hukum diharapkan lebih mengedepankan upaya preventif dengan meningkatkan sosialisasi serta pengawasan terhadap distributor *handphone* di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi aparat penegak hukum serta memperkuat regulasi terkait pengawasan peredaran barang elektronik. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi aspek penting agar kesadaran akan bahaya dan konsekuensi hukum dari penggunaan produk ilegal semakin meningkat

Kata Kunci : Upaya, Tindak Pidana, Penyelundupan, *Handphone*

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING THE CRIMINAL ACT OF MOBILE PHONE TRADE WITH ILLEGAL MOBILE IDENTITY (IMEI) (A Study at the South Sumatra Regional Police)

By

YUDA PRASETYO

The circulation of illegal mobile phones in Indonesia is increasing, particularly in the South Sumatra region. This issue not only affects consumer protection, as buyers risk purchasing products without quality assurance, but also impacts state revenue due to the loss of potential tax income from unregistered goods. The presence of illegal mobile phones also undermines fair business competition and potentially supports broader illicit trade practices. Based on these concerns, this study aims to analyze the efforts undertaken by the South Sumatra Regional Police (Polda Sumsel) to combat the circulation of illegal mobile phones and to identify the obstacles faced in law enforcement.

This research employs both normative juridical and empirical juridical methods. The normative juridical approach examines various regulations related to the circulation of illegal goods, consumer protection, and customs regulations. Meanwhile, the empirical juridical approach involves interviews with law enforcement officers and observations of mobile phone trading practices in South Sumatra. By combining these two methods, this study provides a comprehensive analysis of legal implementation in tackling the circulation of illegal mobile phones.

The research results indicate that the South Sumatra Regional Police (Polda Sumatera Selatan) implement pre-emptive measures through socialization efforts to raise public awareness and preventive measures by collaborating with relevant institutions such as Customs and the Ministry of Communication and Information (Kominfo) to oversee the entry routes of illegal mobile phones. Additionally, Polda Sumsel actively conducts routine patrols in the waters of South Sumatra. Meanwhile, repressive measures taken by Polda Sumsel in combating the distribution of illegal mobile phones include investigation, prosecution, and the destruction of illegal mobile phones as evidence. However, several obstacles hinder law enforcement efforts, such as the legal factor, as there is no specific law regulating sanctions for users of illegal mobile phones; the law enforcement factor, as there are no actions taken against individuals using illegal mobile phones; inadequate facilities and infrastructure; low public legal awareness; and a consumerist culture that prioritizes low prices over legality.

Yuda Prasetyo

As recommendations, law enforcement authorities should prioritize preventive measures by increasing public education and enhancing supervision of mobile phone distributors in South Sumatra. Additionally, the government should provide better facilities and infrastructure for law enforcement officers and strengthen regulations related to the oversight of electronic goods circulation. Public education is also crucial to raise awareness about the dangers and legal consequences of using illegal products.

Keywords: Efforts, Criminal Acts, Smuggling, Mobile Phones